

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penilaian yang diberikan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam kegiatan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang dilaksanakan di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana serta kendala apa saja yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan penilaian. Berdasarkan pemaparan diatas penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis empiris yaitu mengikuti kegiatan pengawasan dan pengamatan yang dilaksanakan hakim. Adapun hasil dari penelitian ini adalah meskipun kegiatan pengawasan dan pengamatan diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimana hakim memiliki peran diluar pengadilan akan tetapi pada pelaksanaannya dilapangan tidak dijalankan secara menyeluruh dikarenakan hakim yang memiliki kompetensi sebagai hakim wasmat hanya sebanyak 2 orang. Selanjutnya pada pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun masih terdapat beberapa kendala sehingga aturan di dalam SEMA tidak dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun. Salah satu faktor yang melatar belakangi adalah jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sarolangun sendiri yang berjumlah 400 narapidana. Adapun saran dari penulis atas permasalahan ini ialah dengan dibentuknya suatu lembaga khusus yang memiliki fokus melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana serta perlu adanya suatu aturan khusus yang memang mengatur kegiatan penilaian dan pengawasan terhadap narapidana secara lebih spesifik.

Kata kunci : *pengawasan, pengamatan, penilaian*

ABSTRACT

This research aims to find out what form of assessment is given by the Supervising Judge and Observer in supervision and observation activities for prisoners carried out at the Sarolangun Class II B Correctional Institution. The problem in this research is the role of supervising judges and observers towards prisoners and what obstacles the supervising judges and observers face in carrying out assessments. Based on the explanation above, the research was carried out using empirical juridical methods, namely following supervision and observation activities carried out by judges. The results of this research are that although supervision and observation activities are regulated in Law Number 8 of 1981 where judges have a role outside the court, their implementation in the field is not carried out thoroughly because there are only 2 judges who have competence as vigilant judges. Furthermore, in the implementation of supervision and observation activities at the Class II B Sarolangun Correctional Institution, there are still several obstacles so that the rules in SEMA cannot be implemented at the Class II B Sarolangun Correctional Institution. One of the underlying factors is the number of inmates at the Sarolangun Penitentiary itself, which amounts to 400 inmates. The author's suggestion regarding this problem is to establish a special institution that has a focus on carrying out supervision and observation activities for prisoners and that there needs to be special regulations that regulate assessment and supervision activities for prisoners more specifically.

Keywords: *supervision, observation, evaluation*